

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2016/2017
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Mata Kuliah	: Penyelesaian Perselisihan Perburuhan & PHK	Kode MK	:
Mata Kuliah Prasyarat	: -	Bobot MK	: 2 sks
Dosen Pengampu	: TIM DOSEN	Kode Dosen	:
Alokasi Waktu	: Tatap muka 14 x 150 menit, tidak ada praktik		
Capaian Pembelajaran	: 1. Mahasiswa mengetahui dan mampu memahami tata cara dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan Industrial di Indonesia. 2. Mahasiswa mengetahui dan mampu memahami tatacara dan prosedur penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang efektif serta mampu menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai hukum.		

SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
1	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (lex specialis) dan perbedaan dengan Hukum Acara Perdata (lex generalis)	Pengantar : Kontrak Pembelajaran, Maksud dan Tujuan Mempelajari Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial & PHK. Prosedur Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web	1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Undang-Undang Nomor 21 / 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai Hukum Acara Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (lex specialis) dan perbedaan dengan Hukum Acara Perdata (lex generalis)
2	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian	Jenis perselisihan hubungan industrial di Indonesia, cara melakukan	1. Metoda <i>contextual instruction</i>	1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai cara melakukan

	perselisihan hubungan industrial dan pemahaman mengenai cara melakukan perundingan bipartit, dan membuat Risalah Perundingan Bipartit	perundingan bipartit, membuat Risalah Perundingan Bipartit	2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web	Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Undang-Undang Nomor 21 / 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb	perundingan bipartit, membuat Risalah Perundingan Bipartit
SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
3	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari perundingan bipartit sampai tahap Mediasi	Kompetensi lembaga Mediasi, Peranan Mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Produk Mediasi, Sifat Anjuran	1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web	1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Undang-Undang Nomor 21 / 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia pada tahap Mediasi, produk Mediasi, dan Sifat Anjuran
4	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari perundingan bipartit hingga tahap Konsiliasi, produk Konsiliasi dan sifat Anjuran	Kompetensi lembaga Konsiliasi, Peranan Konsiliator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Produk Konsiliasi, Sifat Anjuran Konsiliator	1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web	1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Undang-Undang Nomor 21 / 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia pada tahap Konsiliasi, produk Konsiliasi, dan Sifat Anjuran

5	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Arbitrase Hubungan Industrial, produk dan sifat Putusan Arbitrase Hubungan Industrial	Kompetensi lembaga Arbitrase Hubungan Industrial, Peranan Arbiter, Syarat dan Perjanjian Arbitrase, Produk dan Sifat Putusan Arbitrase HI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Undang-Undang Nomor 21 / 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Arbitrase, produk Arbitrase, Sifat Putusan Arbitrase HI.
6	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dari proses Gugatan sampai Kasasi ke MA dan sifat Putusan PHI	Kompetensi Pengadilan HI, Prosedur Gugatan, Produk dan Sifat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dikaitkan dengan jenis perselisihan hubungan industrial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Undang-Undang Nomor 21 / 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari perundingan sampai mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dan kasasi di MA, dan Sifat Putusan PHI
SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
7	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP dalam 1 perusahaan dari perundingan sampai ke Pengadilan	Prosedur penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP dalam 1 perusahaan dari perundingan bipartit sampai ke Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 3. Quiz 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Undang-Undang Nomor 21 / 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP dalam 1 perusahaan

	bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial	Hubungan Industrial		4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb	di Pengadilan Hubungan Industrial
8	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan Hak dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial	Prosedur penyelesaian perselisihan hak dari perundingan bipartit sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 3. Quiz 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Undang-Undang Nomor 21 / 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan Hak dari perundingan bipartit Pengadilan Hubungan Industrial
9	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan PHK dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial	Prosedur penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perundingan bipartit sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 3. Quiz 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 2. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 3. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan PHK dari perundingan bipartit sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial
10	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai syarat & ketentuan umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), alasan alasan PHK yang dilarang oleh peraturan perundangan	Syarat & ketentuan umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Larangan PHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 3. Quiz 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 2. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 3. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai syarat & ketentuan umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), alasan alasan PHK yang dilarang oleh peraturan perundangan

SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
11	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai alasan-alasan PHK yang dapat digunakan (syah) oleh pengusaha prosedur lock out, prosedur mogok kerja yang syah, akibat hukum mogok kerja yang tidak syah.	Alasan-alasan PHK yang dapat digunakan (syah) oleh pengusaha, prosedur lock out, prosedur mogok kerja yang syah, akibat hukum mogok kerja yang tidak syah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : kelas, komputer, <i>LCD</i>, <i>whiteboard</i>, <i>web</i> 3. Quiz 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Undang-Undang Nomor 21 / 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai Alasan-alasan PHK yang dapat digunakan (secara syah) oleh pengusaha, prosedur lock out, prosedur mogok kerja yang syah, akibat hukum mogok kerja yang tidak syah.
12	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK karena alasan perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang melakukan PHK karena perusahaan rugi 2 tahun berturut-turut, Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda : <i>small group discussion</i> 2. Media : kelas, komputer, <i>LCD</i>, <i>whiteboard</i>, <i>web</i> 3. Quiz 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Undang-Undang Nomor 21 / 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang melakukan PHK karena perusahaan rugi 2 tahun berturut-turut, Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

13	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK yang dilakukan pengusaha karena alasan perusahaan melakukan efisiensi	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang melakukan PHK karena alasan efisiensi, Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda : <i>small group discussion</i> 2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 3. Quiz 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Undang-Undang Nomor 21 / 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb 	Menjelaskan tentang Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang hendak melakukan PHK karena alasan efisiensi, Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
14	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK yang dilakukan pengusaha karena perubahan status perusahaan (merger, akuisisi dan konsolidasi), Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang melakukan PHK karena alasan merger, akuisisi atau konsolidasi, Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metoda : <i>small group discussion</i> 2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 3. Quiz 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Undang-Undang Nomor 21 / 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb 	Menjelaskan tentang Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang hendak melakukan PHK karena alasan merger, akuisisi atau konsolidasi, Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

EVALUASI PEMBELAJARAN

SESI	PROSE-DUR	BEN-TUK	SEKOR ≥ 77 (A / A-)	SEKOR ≥ 65 (B- / B / B+)	SEKOR ≥ 60 (C / C+)	SEKOR ≥ 45 (D)	SEKOR < 45 (E)	BOBOT
1	<i>Pretest test</i>	Tes lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai perbedaan antara prosedur Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (lex specialis) dengan Hukum Acara Perdata (lex generalis) dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai perbedaan antara prosedur Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (lex specialis) dengan Hukum Acara Perdata (lex generalis) dengan benar serta dapat memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (lex specialis) namun tidak akurat serta dapat memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (lex specialis) namun kurang benar tanpa dapat memberikan contohnya	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %
2	<i>Progress test dan post test</i>	Tes lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemahaman mengenai cara melakukan perundingan bipartit, dan membuat Risalah Perundingan Bipartit	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemahaman mengenai cara melakukan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemahaman mengenai cara melakukan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemahaman mengenai cara melakukan	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %

			dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya	perundingan bipartit, dan membuat Risalah Perundingan Bipartit dengan benar serta dapat memberikan contohnya	perundingan bipartit, dan membuat Risalah Perundingan Bipartit Namun kurang benar serta dapat memberikan contohnya	perundingan bipartit benar, tetapi tidak dapat membuat Risalah Perundingan Bipartit tanpa memberikan contohnya		
SESI	PROSE-DUR	BEN-TUK	SEKOR ≥ 77 (A / A-)	SEKOR ≥ 65 (B- / B / B+)	SEKOR ≥ 60 (C / C+)	SEKOR ≥ 45 (D)	SEKOR < 45 (E)	BOBOT
3	<i>progress test</i> dan <i>post test</i>	Tes lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari perundingan bipartit sampai tahap Mediasi, produk Mediasi dan sifat Mediasi dengan baik dan benar serta memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari perundingan bipartit sampai tahap Mediasi, produk Mediasi dan sifat Mediasi dengan benar serta memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari perundingan bipartit sampai tahap Mediasi, produk Mediasi dan sifat Mediasi namun kurang benar serta dapat memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari perundingan bipartit sampai tahap Mediasi, produk Mediasi dan sifat Mediasi dengan kurang benar tanpa memberikan contohnya	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %

4	<i>Progress test dan post test</i>	Tes lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari perundingan bipartit hingga tahap Konsiliasi, produk Konsiliasi dan sifat Anjuran dengan baik dan benar serta memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari perundingan bipartit hingga tahap Konsiliasi, produk Konsiliasi dan sifat Anjuran dengan benar serta dapat memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari perundingan bipartit hingga tahap Konsiliasi, produk Konsiliasi dan sifat Anjuran namun kurang benar serta dapat memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari perundingan bipartit hingga tahap Konsiliasi, produk Konsiliasi dan sifat Anjuran namun kurang benar tanpa memberikan contohnya	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %
SESI	PROSE-DUR	BEN-TUK	SEKOR \geq 77 (A / A-)	SEKOR \geq 65 (B- / B / B+)	SEKOR \geq 60 (C / C+)	SEKOR \geq 45 (D)	SEKOR < 45 (E)	BOBOT
5	<i>Progress test dan post test</i>	Tes lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Arbitrase Hubungan Industrial, produk dan sifat Putusan Arbitrase Hubungan Industrial	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Arbitrase Hubungan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Arbitrase Hubungan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Arbitrase Hubungan	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %

			dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya	Industrial, produk dan sifat Putusan Arbitrase Hubungan Industrial dengan benar serta dapat memberikan contohnya	Industrial, produk dan sifat Putusan Arbitrase Hubungan Industrial namun kurang benar serta dapat memberikan contohnya	Industrial, produk dan sifat Putusan Arbitrase Hubungan Industrial namun kurang benar tanpa memberikan contohnya		
6	<i>Progress test dan post test</i>	Tes lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dari proses Gugatan sampai Kasasi ke MA dan sifat Putusan PHI dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dari proses Gugatan sampai Kasasi ke MA dan sifat Putusan PHI dengan benar serta memberikan contoh	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dari proses Gugatan sampai Kasasi ke MA dan sifat Putusan PHI namun kurang benar serta memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dari proses Gugatan sampai Kasasi ke MA dan sifat Putusan PHI namun kurang benar tanpa memberikan contoh	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %

SESI	PROSE-DUR	BEN-TUK	SEKOR ≥ 77 (A / A-)	SEKOR ≥ 65 (B- / B / B+)	SEKOR ≥ 60 (C / C+)	SEKOR ≥ 45 (D)	SEKOR < 45 (E)	BOBOT
7	<i>Progress test dan post test</i>	Tes lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP dalam 1 perusahaan dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP dalam 1 perusahaan dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial dengan benar serta dapat memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP dalam 1 perusahaan dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial namun kurang benar serta dapat memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP dalam 1 perusahaan dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial dengan kurang benar serta tanpa memberikan contohnya	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %
8	<i>Progress test dan post test</i>	Tes lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan Hak dari perundingan bipartit hingga Pengadilan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan Hak	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %

			Hubungan Industrial dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya	dari tahap perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial dengan benar serta dapat memberikan contohnya	Hak dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial namun kurang benar serta memberikan contohnya	Hak dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial namun kurang benar tanpa memberikan contohnya		
SESI	PROSE-DUR	BEN-TUK	SEKOR \geq 77 (A / A-)	SEKOR \geq 65 (B- / B / B+)	SEKOR \geq 60 (C / C+)	SEKOR \geq 45 (D)	SEKOR $<$ 45 (E)	BOBOT
9	<i>Progress test dan post test</i>	Tes lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan PHK dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial dengan baik dan benar serta memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan PHK dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial dengan benar serta memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan PHK dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial namun kurang benar serta memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan PHK dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial namun kurang benar tanpa memberikan contohnya	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %
10	<i>Progress test dan post test</i>	Tes lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan	Mahasiswa mampu memberikan	Mahasiswa mampu memberikan	Mahasiswa mampu memberikan	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	6 %

			pemahaman mengenai syarat & ketentuan umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), alasan alasan PHK yang dilarang oleh peraturan perundangan dengan baik dan benar serta memberikan contohnya	pengertian dan pemahaman mengenai syarat & ketentuan umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), alasan alasan PHK yang dilarang oleh peraturan perundangan dengan benar serta memberikan contohnya	pengertian dan pemahaman mengenai syarat & ketentuan umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), alasan alasan PHK yang dilarang oleh peraturan perundangan namun kurang benar serta memberikan contohnya	pengertian dan pemahaman mengenai syarat & ketentuan umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), alasan alasan PHK yang dilarang oleh peraturan perundangan namun kurang benar tanpa memberikan contohnya		
SESI	PROSE-DUR	BEN-TUK	SEKOR ≥ 77 (A / A-)	SEKOR ≥ 65 (B- / B / B+)	SEKOR ≥ 60 (C / C+)	SEKOR ≥ 45 (D)	SEKOR < 45 (E)	BOBOT
11	<i>Progress test dan post test</i>	Tes lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai alasan-alasan PHK yang dapat digunakan (syah) oleh pengusaha prosedur lock out, prosedur mogok kerja yang syah, akibat hukum mogok kerja yang tidak syah dengan baik dan benar serta	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai alasan-alasan PHK yang dapat digunakan (syah) oleh pengusaha prosedur lock out, prosedur mogok kerja yang syah, akibat hukum mogok	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai alasan-alasan PHK yang dapat digunakan (syah) oleh pengusaha prosedur lock out, prosedur mogok kerja	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai alasan-alasan PHK yang dapat digunakan (syah) oleh pengusaha prosedur lock out, prosedur mogok kerja	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	10 %

			memberikan contohnya	kerja yang tidak syah dengan benar serta dapat memberikan contoh	yang syah, akibat hukum mogok kerja yang tidak syah dengan kurang benar serta memberikan contoh	yang syah, akibat hukum mogok kerja yang tidak syah dengan kurang benar tanpa memberikan contoh		
12	<i>Progress test dan post test</i>	Tes lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK karena alasan perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan baik dan benar serta memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK karena alasan perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan benar serta memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK karena alasan perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak namun kurang benar serta memberikan contohnya	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK karena alasan perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak namun kurang benar tanpa memberikan contohnya	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	10 %

SESI	PROSE-D UR	BEN-TU K	SEKOR ≥ 77 (A / A-)	SEKOR ≥ 65 (B- / B / B+)	SEKOR ≥ 60 (C / C+)	SEKOR ≥ 45 (D)	SEKOR < 45 (E)	BOBOT
13	<i>Progress test dan post test</i>	Tes Lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK karena alasan perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan baik dan benar serta memberikan contohnya.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK karena alasan perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan benar serta memberikan contohnya.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK karena alasan perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak namun kurang benar serta memberikan contohnya.	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK karena alasan perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak namun kurang benar tanpa memberikan contohnya.	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	10 %
14	<i>Progress test dan post test</i>	Tes Lisan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK yang dilakukan pengusaha karena perubahan status perusahaan	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK yang dilakukan pengusaha	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK yang dilakukan pengusaha	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK yang dilakukan pengusaha	Tidak mampu menguraikan (menjawab)	10 %

			(merger, akuisisi dan konsolidasi), Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan baik dan benar serta dapat memberikan contohnya.	karena perubahan status perusahaan (merger, akuisisi dan konsolidasi), Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan benar serta dapat memberikan contohnya.	karena perubahan status perusahaan (merger, akuisisi dan konsolidasi), Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, namun kurang benar serta dapat memberikan contohnya.	karena perubahan status perusahaan (merger, akuisisi dan konsolidasi), Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, namun kurang benar serta tanpa memberikan contohnya.		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

Komponen penilaian :

1. Kehadiran = 10 %
2. Tugas = 20 %
3. UTS = 30 %
4. UAS = 40 %

**Mengetahui,
Ketua Program Studi,**

Jakarta, 21 Oktober 2016

Dosen Pengampu

DR. Retno Kus Setyowati SH, MM.MH

TIM DOSEN P3PHK /Agus S